

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Dari hasil penelitian dan hasil analisis data dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan rasio kemandirian keuangan daerah yang ditunjukkan dengan angka rasio rata-ratanya adalah 2,93 % masih berada diantara 0 %-25 % tergolong mempunyai pola hubungan instruktif yang berarti kemampuan Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara dalam memenuhi kebutuhan dana untuk penyelenggaraan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan, dan Pelayanan Sosial masyarakat masih relatif rendah meskipun dari tahun ke tahun terus meningkat. Sedangkan tingkat ketergantungan pada sumber pendapatan dari pihak ekstern yang masih cukup tinggi disebabkan karena sumber-sumber keuangan potensial negara adalah milik pemerintah pusat.
2. Berdasarkan Rasio Derajat Desentralisasi Fiskal, selama 3 (tiga) tahun Derajat Desentralisasi Fiskal adalah sangat kurang karena hanya memiliki rata-rata 2,28 %, hal ini berarti bahwa tingkat kemandirian / kemampuan keuangan Kabupaten Gorontalo Utara masih rendah dalam melaksanakan otonominya.
3. Berdasarkan kemampuan PAD untuk membiayai pengeluaran rutin daerah, yang sering disebut juga dengan IKR (Indeks Kemampuan Rutin) rata-rata hanya sebesar 4,31 %, ini artinya IKR di Kabupaten Gorontalo Utara sangat kurang karena masih berada dalam skala interval antara 0,00-20,00. Hal ini

berarti PAD memiliki kemampuan yang sangat kurang untuk membiayai pengeluaran rutinnya dan pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara masih tergantung pada sumber penerimaan keuangan dari pemerintah pusat.

4. Berdasarkan rasio Keserasian, pengeluaran belanja operasi lebih besar dibandingkan dengan belanja modal. Besarnya belanja operasi ini dikarenakan besarnya dinas-dinas otonomi dan belanja pegawai untuk gaji PNS.
5. Berdasarkan Rasio Pertumbuhan, secara keseluruhan mengalami peningkatan disetiap tahunnya yang disebabkan bertambahnya penerimaan pajak dan retribusi daerah.
6. Secara keseluruhan dari hasil analisis beberapa rasio yang ada ternyata perkembangan kemampuan keuangan daerah yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara belum optimal. Ini bisa dilihat dari kurangnya kemampuan PAD untuk bisa mengimbangi besarnya belanja daerah, dimana masih besarnya tingkat ketergantungan terhadap dana alokasi dari pemerintah pusat untuk membiayai belanja daerah.

## **5.2.Saran**

Berdasarkan hasil analisis data dan kesimpulan tentang kinerja keuangan Pemerintah kabupaten Gorontalo Utara, penulis mencoba mengajukan beberapa saran. Saran-saran tersebut adalah sebagai berikut :

1. Perlu diadakannya peningkatan besarnya dana PAD dimana terbatasnya jumlah dan jenis sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten

Gorontalo Utara, maka diperlukan penyerahan beberapa sumber keuangan nasional yang potensial untuk dikelola dan dipungut sendiri oleh daerah dan menjadi penerimaan PAD untuk peningkatan PAD.

2. Penelitian ini hanya menganalisis beberapa komponen dalam perkembangan APBD, diharapkan untuk penelitian selanjutnya dapat menganalisis seluruh komponen yang terdapat dalam APBD sehingga akan lebih lengkap.
3. Penelitian ini hanya menggunakan beberapa model analisis rasio keuangan, untuk penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan seluruh model analisis rasio keuangan sehingga hasil analisisnya lebih lengkap dan menyeluruh.
4. Penelitian ini hanya dilakukan pada tahun anggaran 2008-2010 di Kabupaten Gorontalo Utara saja, diharapkan untuk penelitian selanjutnya obyek penelitiannya dilakukan di beberapa daerah lain sehingga terdapat perbandingan antara daerah yang satu dengan daerah yang lain.

## DAFTAR PUSTAKA

- Bahtiar Arif, Muchlis, Iskandar. 2002. *Akuntansi Pemerintahan*, Jakarta : Salemba Empat.
- Darise, Nurlan. 2006. *Pengelolaan Keuangan Daerah*. Jakarta : Gramedia
- Fajar Sakti, adhidian. 2007. Analisis Perkembangan Kemampuan Keuangan Daerah Dalam Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Di Kabupaten Sukoharjo, Surakarta: Universitas Muhammadiyah.
- Halim, Abdul. 2002. *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta : Salemba Empat.
- Karya Satya Azhar, Mhd. 2008. Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Sebelum dan Sesudah pelaksanaan Otonomi Daerah, Medan: Universitas Sumatera Utara.
- Mahmudi. 2010. *Analisis Laporan keuangan Pemerintah Daerah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN
- Mursyidi. 2009. *Akuntansi Pemerintahan di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama
- Nazir, Mohammad. 2005. *Metode Penelitian*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Nur Indriantoro, Bambang Supomo. 2002. *Metode Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta
- Suparmoko. 2002. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: ANDI.
- Tanjung, Abdul Hafiz. 2007. *Akuntansi Pemerintahan Daerah*. Bandung: Alfabeta
- UU RI. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah*.
- UU RI. 2004. *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah*.
- UU RI. 2000. *Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 Tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah*.

- UU RI. 2004. *Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2004 Tentang Retribusi Daerah.*
- UU RI. 2001. *Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah.*
- UU RI. 2005. *Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintahan.*
- Wahyuni, sri. 2008. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Sragen dalam mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah, Surakarta: Universitas Muhammadiyah.